

REFERENSI

No. 01/ref.PKA/VI/2021

**PERKEMBANGAN PMDN DAN PMA DI INDONESIA
TAHUN 2016-2020**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN - SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

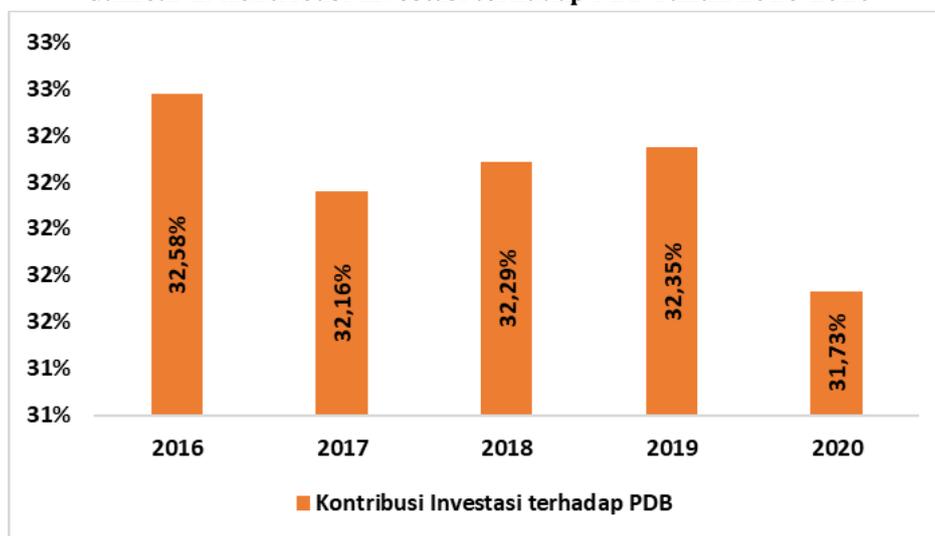
Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia Tahun 2016-2020

Ervita Luluk Zahara¹ dan Emillia Octavia²

I. Pendahuluan

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen dalam pertumbuhan ekonomi. Adanya aktivitas investasi akan memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi merupakan penyumbang kedua terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) setelah konsumsi rumah tangga. Di tahun 2018, kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan yaitu menjadi 32,29 persen dari 32,16 persen pada tahun 2017 yang berlanjut hingga tahun 2019 (Gambar 1). Pada tahun 2020, kontribusi investasi turun menjadi 31,73 persen.

Gambar 1. Kontribusi Investasi terhadap PDB Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan statusnya, investasi meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

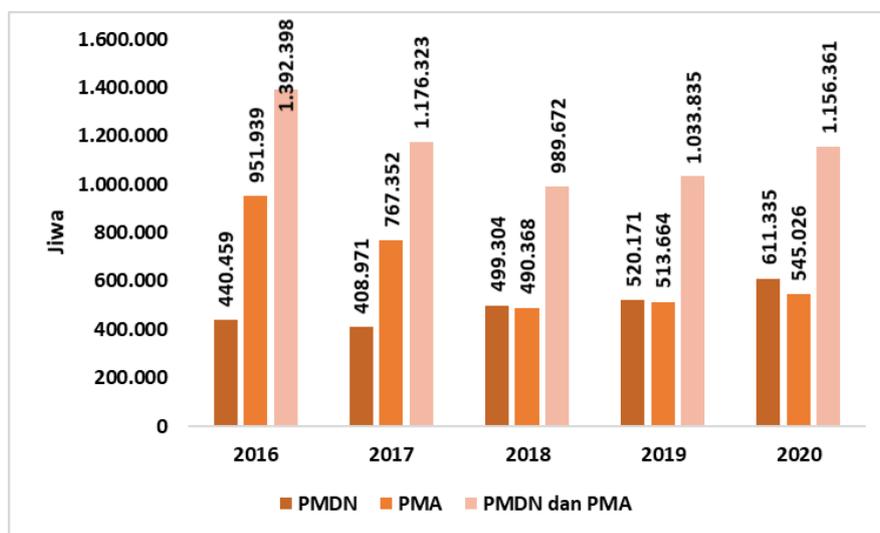
Peran investasi dalam perekonomian nasional dapat dilihat juga melalui realisasi penyerapan tenaga kerja. Dari data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi

¹ Analis APBN, e-mail: ervitazahara94@gmail.com

² Analis APBN, e-mail: emil.octa@yahoo.com

Penanaman Modal (BKPM) dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 penyerapan tenaga kerja pada PMA lebih besar dibandingkan tenaga kerja yang terserap pada PMDN (Gambar 2). Sedangkan selama tahun 2018 sampai 2020 PMDN lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan PMA. Serapan tenaga kerja pada PMDN cenderung mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir dengan penyerapan terbesar di tahun 2020 sebanyak 611.335 jiwa. Sementara pada PMA, penyerapan tenaga kerja mengalami fluktuasi, namun jumlahnya menurun di tahun 2020 jika dibandingkan dengan di tahun 2016. Secara keseluruhan, pada tahun 2020, tenaga kerja yang terserap baik melalui PMDN maupun PMA meningkat yaitu dari 1.033.835 jiwa di tahun 2019 menjadi 1.156.361 jiwa.

Gambar 2. Penyerapan Tenaga Kerja dari PMDN dan PMA Tahun 2016-2020



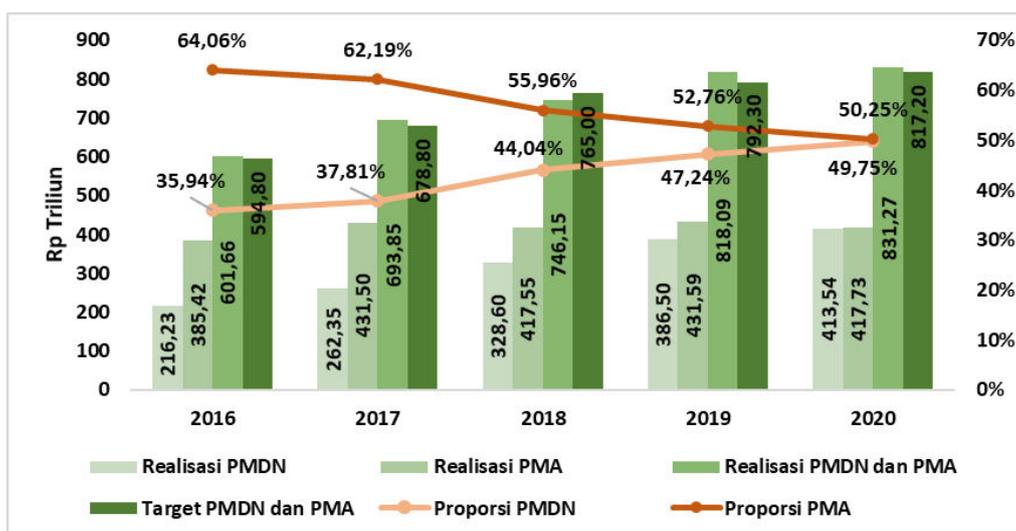
Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (diolah)

II. Perkembangan PMDN dan PMA

Dalam periode 2016 sampai dengan 2020, realisasi PMDN terus meningkat dengan nilai di tahun 2020 sebesar Rp413,54 triliun (Gambar 3). Di sisi lain, nilai PMA sempat naik dari 385,42 triliun di tahun 2016 menjadi 431,50 triliun di tahun 2017. Meskipun sempat naik lagi di tahun 2019 menjadi Rp431,59 triliun, namun PMA kembali turun menjadi Rp417,73 triliun di tahun 2020. Secara gabungan, nilai PMDN dan PMA mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir yaitu dari Rp601,66 triliun di tahun 2016 menjadi Rp831,27 triliun. Realisasi PMDN dan PMA selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada di atas target kecuali realisasi di tahun 2018. Pada triwulan I 2021, realisasi investasi mencapai Rp216,58 triliun dengan nilai PMDN dan PMA masing-masing sebesar Rp108,02 triliun dan Rp108,56 triliun.

Proporsi PMA dalam investasi selalu lebih besar dibandingkan dengan proporsi PMDN. Tahun 2016 proporsi PMA sebesar 64,06 persen sedangkan PMDN sebesar 35,94 persen (Gambar 3). Namun dalam tahun-tahun berikutnya, proporsi PMA mengalami penurunan dan proporsi PMDN mengalami peningkatan dengan proporsi di tahun 2020 masing-masing yaitu 50,25 persen dan 49,75 persen.

Gambar 3. Perkembangan dan Proporsi PMDN-PMA Tahun 2016-2020



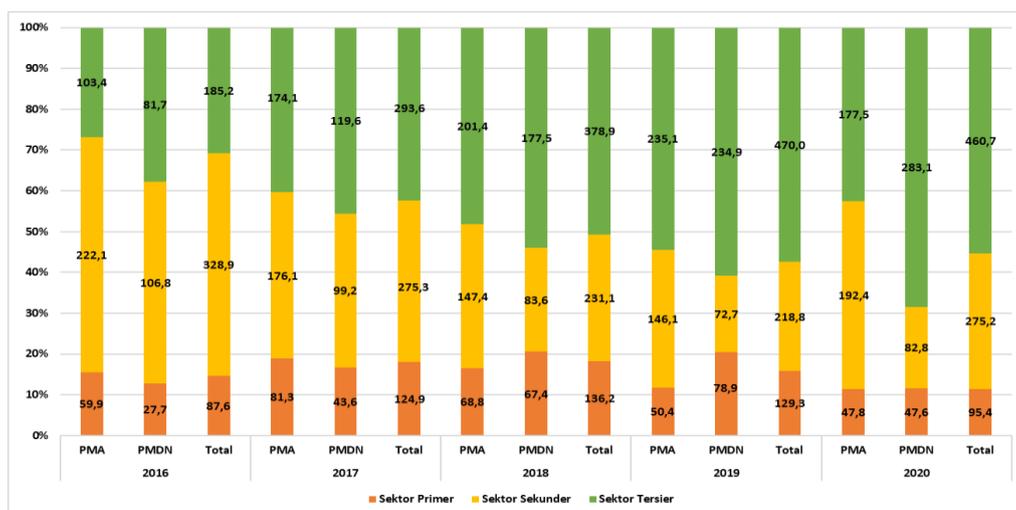
Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (diolah)

Catatan: 2016-2019 kurs dari LKPP, 2020 kurs dari Bank Indonesia

III. Realisasi PMDN dan PMA Dilihat dari Sektor, Lokasi dan Negara Asal

Perkembangan PMDN dan PMA dapat dilihat dari sektor penempatan investasi yang meliputi sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Pada Gambar 4, dapat terlihat bahwa selama tahun 2016 sampai 2020, sektor primer merupakan sektor dengan realisasi investasi terendah jika dibandingkan dengan dua sektor lainnya. Kondisi yang sama juga terjadi baik pada sisi PMDN maupun PMA. Sektor primer sempat meningkat di tahun 2017 dan 2018, kemudian menurun kembali sampai tahun 2020. Realisasi investasi di sektor sekunder merupakan yang terbesar dibandingkan sektor lainnya di tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 sampai 2020, sektor tersier merupakan sektor dengan nilai investasi terbesar.

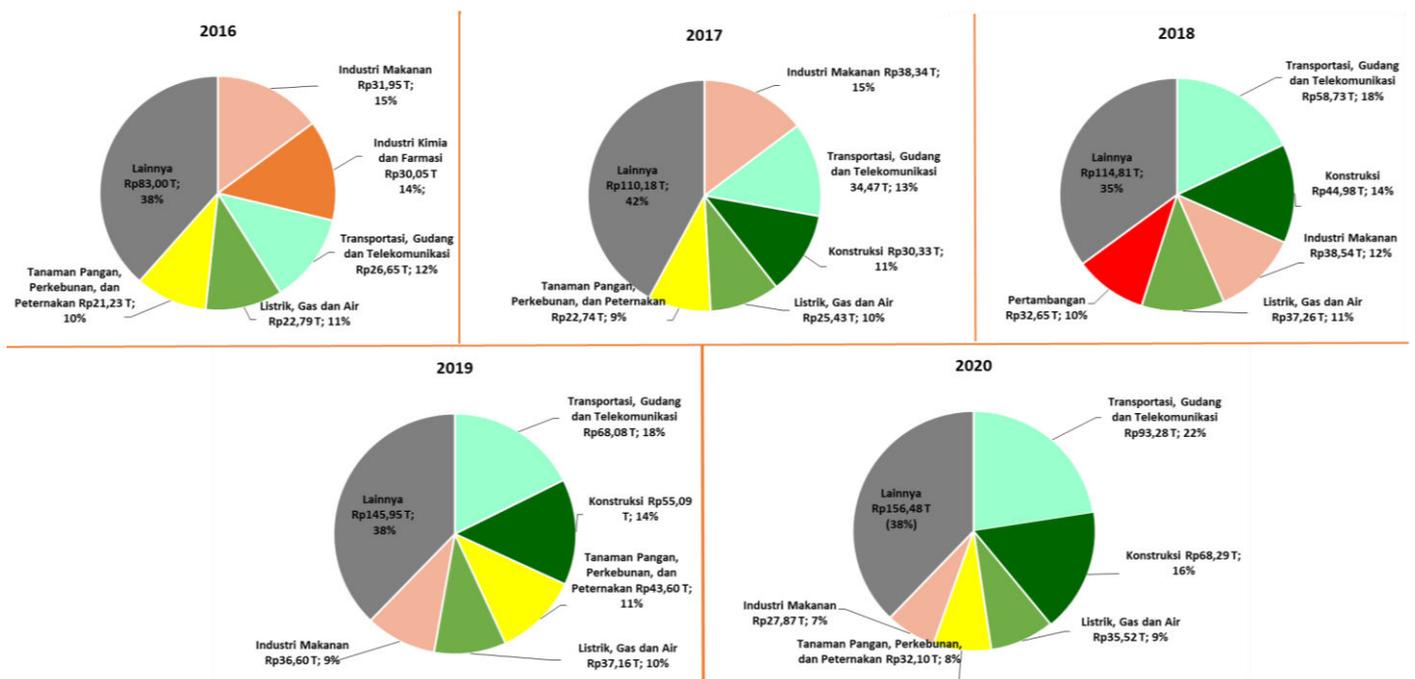
Gambar 4. Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Tahun 2016-2020



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (diolah)

Pada periode 2016-2020, sektor industri makanan dan sektor listrik, gas dan air selalu masuk ke dalam 5 besar penyumbang PMDN (Gambar 5). Sementara dalam kurun tahun 2018-2020 sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi menjadi penyumbang PMDN terbesar, diikuti oleh sektor konstruksi. Sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi mengalami peningkatan realisasi investasi yang cukup besar yaitu dari sebesar Rp26,65 triliun di tahun 2016 menjadi Rp93,28 triliun pada tahun 2020. Pada periode tahun 2019-2020, 5 sektor penyumbang PMDN terbesar berasal dari sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi; konstruksi; listrik, gas dan air; tanaman pangan, perkebunan dan peternakan; dan industri makanan.

Gambar 5. Perkembangan Sektor PMDN Tahun 2016-2020

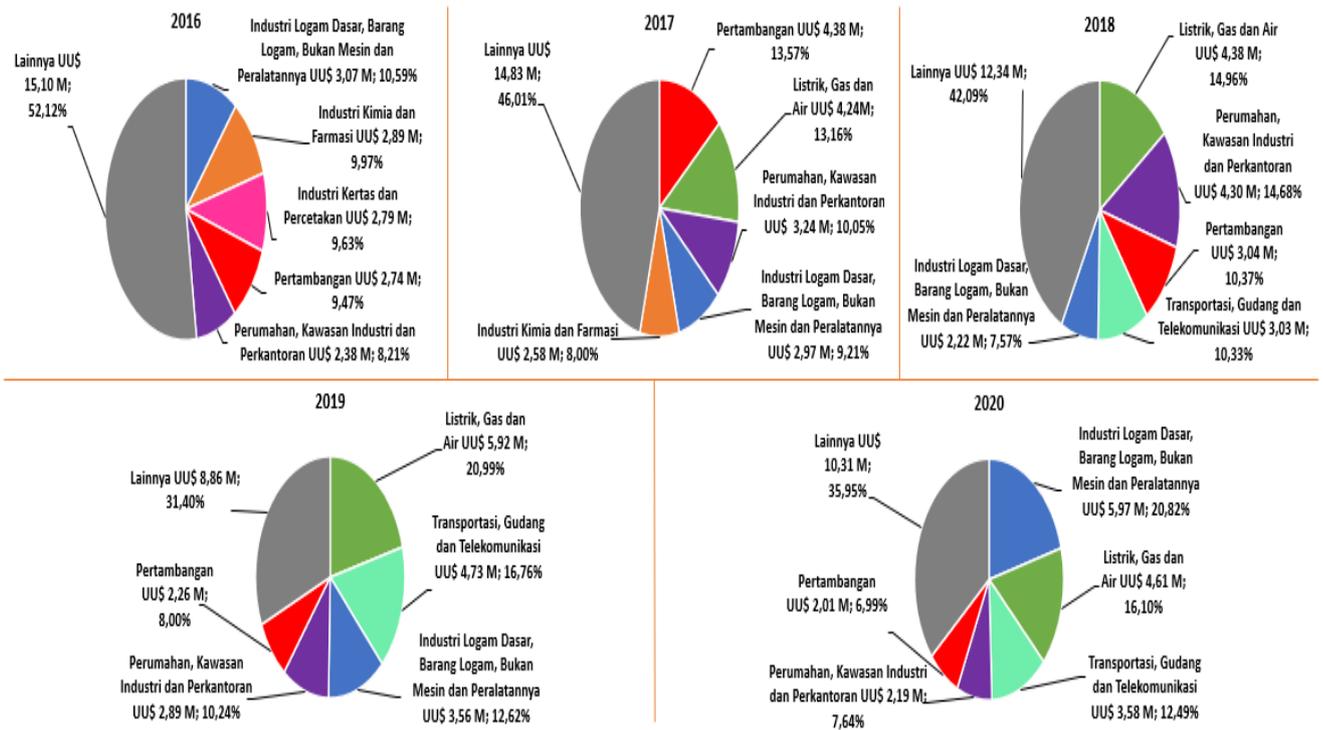


Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (diolah)

Sektor terbesar penyumbang PMA di tahun 2016 banyak berasal dari sektor sekunder, di mana 3 subsektornya masuk dalam 5 terbesar sektor PMA. Sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2020, kontribusi PMA terbesar pada kelompok 5 besar berasal dari sektor listrik, gas dan air; perumahan, kawasan industri dan perkantoran; transportasi, gudang dan telekomunikasi; industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; serta pertambangan (Gambar 6).

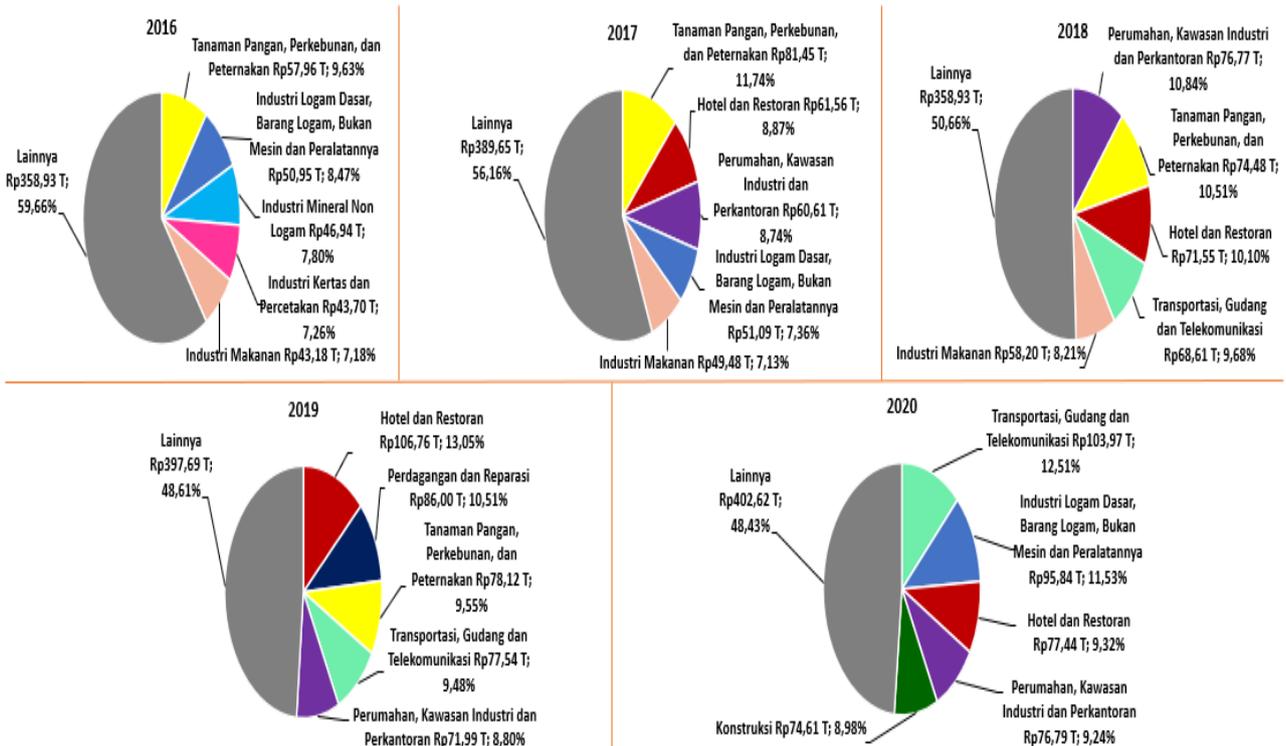
Jika dilihat secara gabungan PMDN dan PMA, maka sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang merupakan sektor primer termasuk dalam sektor penyumbang investasi terbesar dari tahun 2016 sampai 2019 (Gambar 7). Sementara itu, sektor hotel dan restoran; transportasi, gudang dan telekomunikasi; serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran merupakan sektor tersier yang sering masuk dalam 5 sektor penyumbang investasi terbesar dalam periode 2016 sampai 2020.

Gambar 6. Perkembangan Sektor PMA Tahun 2016-2020



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (diolah)

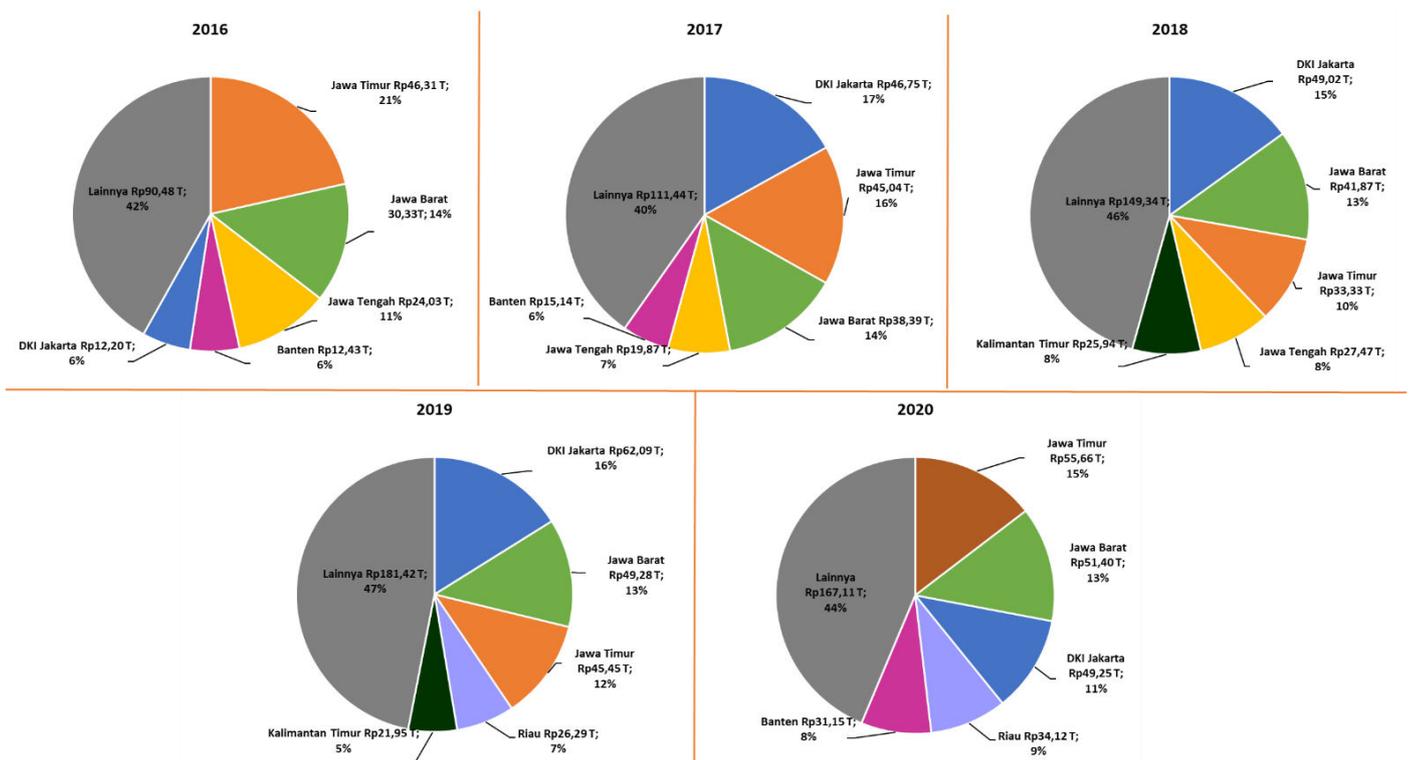
Gambar 7. Perkembangan Sektor PMDN dan PMA Tahun 2016-2020



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (diolah)

Jika dilihat realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi, pada kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat bahwa DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat selalu masuk dalam 5 besar penyumbang PMDN. Pada kurun waktu tersebut, Kalimantan Timur dan Riau merupakan daerah di luar Jawa yang masuk ke dalam 5 besar penyumbang PMDN (Kalimantan Timur: tahun 2018 dan 2019, Riau: tahun 2019 dan 2020). Pada Gambar 8 terlihat bahwa proporsi akumulasi investasi PMDN pada *top 5* lokasi penyumbang PMDN masih lebih besar dari pada total investasi PMDN daerah lainnya (29 provinsi lainnya).

Gambar 8. Tren Lokasi PMDN Tahun 2016-2020

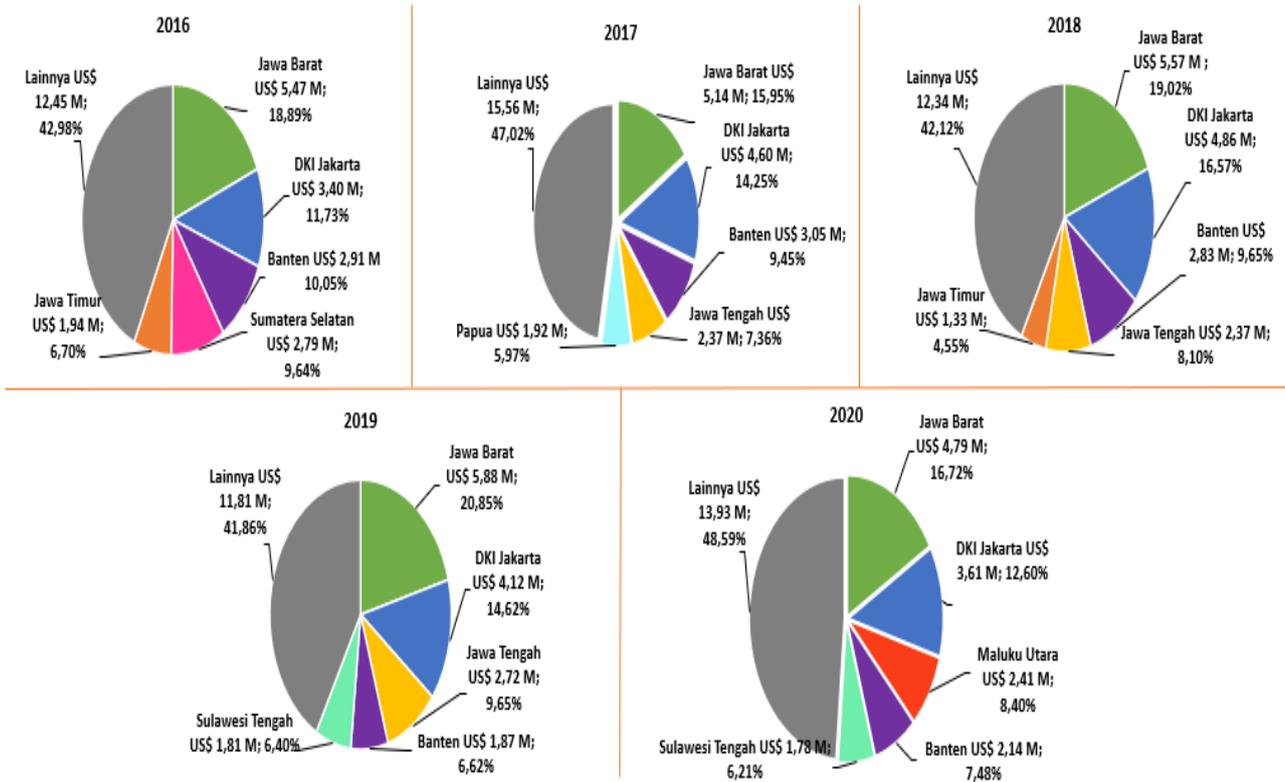


Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (diolah)

Berdasarkan realisasi sebaran lokasi investasi PMA (Gambar 9), dapat dilihat bahwa Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten selalu menjadi penyumbang PMA terbesar dalam 5 tahun terakhir. Daerah di kawasan Indonesia timur yang masuk dalam 5 besar penyumbang PMA terbesar yaitu Papua (2017), Sulawesi Tengah (2019 dan 2020) serta Maluku Utara (2020).

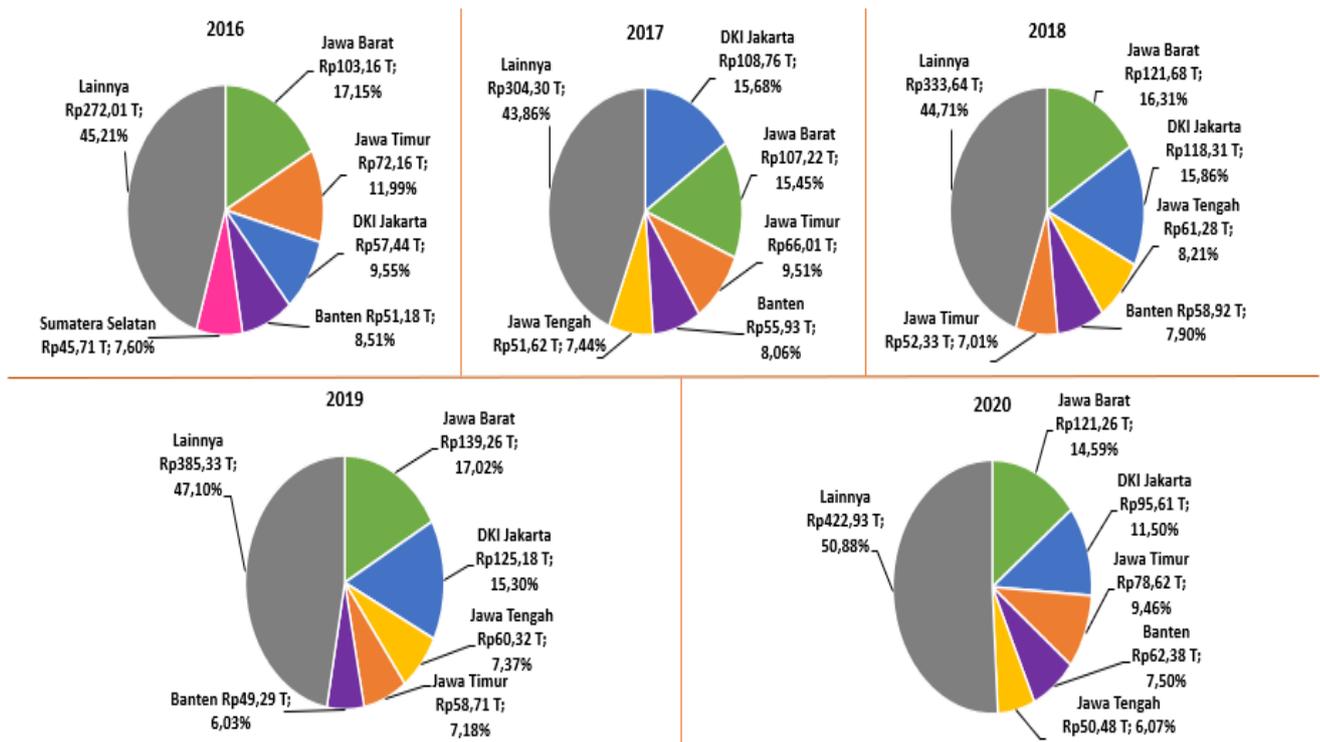
Sementara itu, pada gabungan PMDN dan PMA (Gambar 10), tren sebaran lokasi dengan investasi terbesar selama tahun 2016-2020 tidak terlalu berbeda di mana daerah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten selalu masuk dalam lokasi investasi terbesar.

Gambar 9. Tren Lokasi PMA Tahun 2016-2020



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (diolah)

Gambar 10. Tren Lokasi PMDN dan PMA Tahun 2016-2020



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (diolah)
Tabel 1. Tren Negara Asal PMA Tahun 2016-2020

2016		2017		2018		2019		2020	
Negara Asal	I*	Negara Asal	I	Negara Asal	I	Negara Asal	I	Negara Asal	I
Singapura**	9,18	Singapura	8,44	Singapura	9,19	Singapura	5,38	Singapura	7,14
Jepang	5,40	Jepang	5,00	Jepang	4,95	R.R. Tiongkok	3,31	R.R. Tiongkok	3,51
R.R. Tiongkok	2,67	R.R. Tiongkok	3,36	R.R. Tiongkok	2,38	Jepang	3,24	Hongkong, RRT	2,48
Hongkong, RRT	2,25	Hongkong, RRT	2,12	Hongkong, RRT	2,01	Belanda	2,10	Jepang	2,13
Belanda	1,48	Korea Selatan	2,02	Malaysia	1,77	Hongkong, RRT	1,75	Korea Selatan	1,14
Lainnya	8,00	Lainnya	11,30	Lainnya	9,00	Lainnya	5,41	Lainnya	4,52

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (diolah)

* I = investasi (dalam Rp Triliun)

** Investasi yang berasal dari semua perusahaan yang tercatat di Singapura (terkait dengan fasilitas kemudahan investasi).

Dalam data realisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM (Tabel 1), dapat dilihat bahwa negara asal PMA terbesar didominasi oleh negara di kawasan Asia yaitu Singapura, Jepang, R.R. Tiongkok dan Hongkong. Dalam beberapa tahun terakhir, RRT menjadi negara asal PMA dengan nilai terbesar. Selain negara-negara di Asia, Belanda merupakan negara di luar Asia yang juga menjadi investor terbesar yaitu pada tahun 2016 dan 2019.

IV. Perkembangan Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia

Investasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan suatu negara. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan modal dan investasi yang besar, tidak hanya dari Pemerintah dan swasta nasional namun termasuk dari luar negeri (asing). Dalam mengembangkan bisnis ke berbagai negara, investor menghadapi kemudahan ataupun hambatan yang berbeda-beda dalam melakukan investasinya. Sehingga muncul indeks kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) yang merupakan peringkat kemudahan berusaha yang dilihat dari beberapa indikator, sehingga dapat dijadikan acuan bagi suatu negara untuk dapat melihat indikator apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Adapun peringkat kemudahan berusaha Indonesia pada tahun 2016 adalah 106. Kemudian mengalami kenaikan menjadi *ranking* 72 pada tahun 2018. Namun setelah itu mengalami penurunan *ranking* menjadi 73 dari 190 negara pada tahun 2019 dan 2020. Peringkat tersebut masih di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan Vietnam. Apabila dibandingkan dengan rata-rata skor EoDB tahun 2016-2020, Indonesia juga masih berada di bawah ke 5 (lima) negara tersebut. Jika dibandingkan dengan BRICS *country* (Brazil, Russian Federation, India, China, dan South Africa), *ranking* EoDB Indonesia tahun 2020 masih di bawah Rusia, India dan China. Namun jika dilihat rata-rata skor EoDB tahun 2016-2020, Indonesia masih di bawah Rusia, China, dan Afrika Selatan. Peringkat EoDB Indonesia masih jauh di bawah target Pemerintah yaitu masuk 40 besar dunia (Tabel 2).

Tabel 2. Peringkat dan Skor *Doing Business* Negara ASEAN dan BRICS

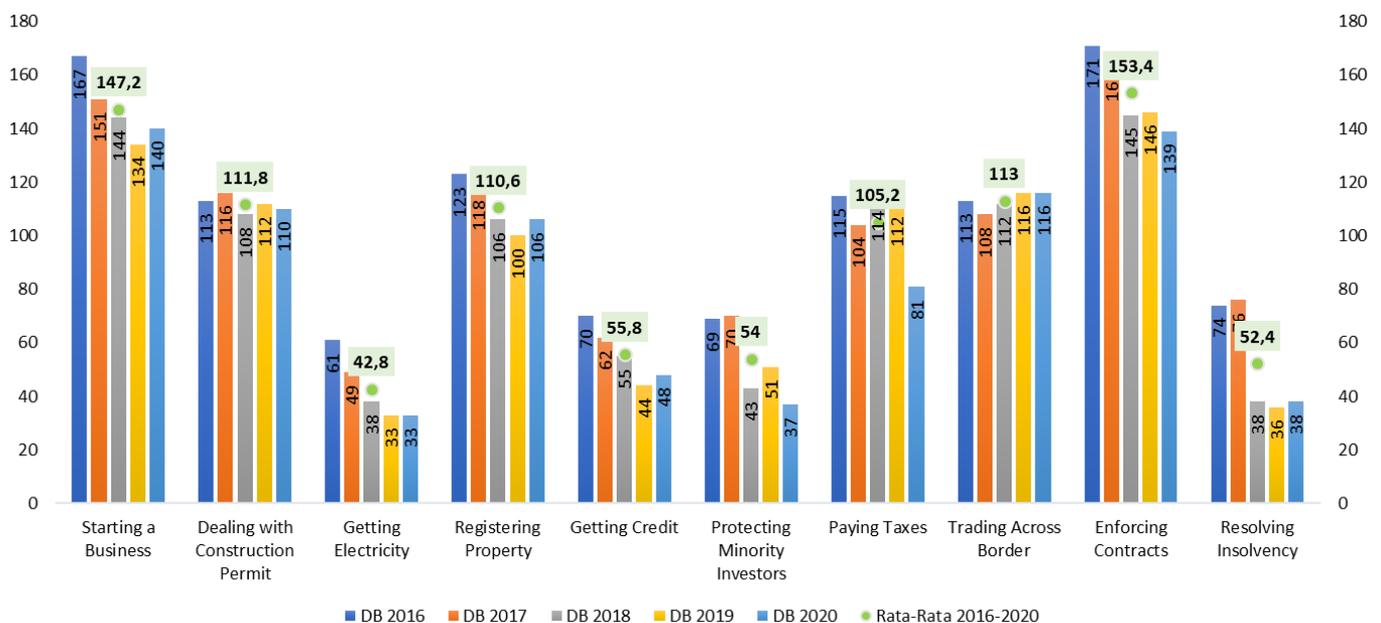
Negara	Peringkat EoDB 2020	Skor DB 2020	Rata-rata Skor 2016-2020
ASEAN			
Indonesia	73	69,6	64,7
Singapore	2	86,2	85,7
Malaysia	12	81,5	79,6
Thailand	21	80,1	76,0
Brunei Darussalam	66	70,1	68,2
Vietnam	70	69,8	66,4
Philippines	95	62,8	59,9
Cambodia	144	53,8	54,6
Lao PDR	154	50,8	52,4
Myanmar	165	46,8	45,1
BRICS Country			
Brazil	124	59,1	58,0
Russian Federation	28	78,2	75,1
India	63	71,0	61,8
China	31	77,9	68,8
South Africa	84	67,0	65,6

Sumber: World Bank Group

Data EoDB sering digunakan untuk melihat dan menilai kondisi perekonomian dan regulasi atau peraturan terkait penanaman modal asing ke suatu negara. Berdasarkan *Doing Business reports*, terdapat beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian dan dorongan khusus, yaitu indikator *starting a business* (memulai usaha), *dealing with construction permit* (perizinan terkait mendirikan bangunan), *registering property* (pendaftaran properti), *paying taxes* (pembayaran pajak), *trading across border* (perdagangan lintas negara), dan *enforcing contract* (penegakan kontrak), di mana jika dilihat secara rata-rata dari tahun 2016-2020, masih memiliki peringkat rata-rata di atas 100. Salah satu dari 6 (enam) indikator tersebut, yaitu indikator *paying taxes* (pembayaran pajak), di tahun 2020 sudah mulai meningkat yaitu berada di *ranking* 81. Sementara itu, indikator *trading across borders* (perdagangan lintas negara) dan *dealing with construction permit* (perizinan terkait mendirikan bangunan) relatif tidak ada perbaikan peringkat dalam 5 tahun terakhir (Gambar 11).

Sebagai informasi tambahan, secara khusus mengenai hambatan PMA di Indonesia, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam *Investment Policy Reviews: Indonesia 2020* menyebutkan bahwa investor asing ragu berurusan dengan bisnis Indonesia yang rumit, setidaknya karena masih adanya hambatan PMA dan persyaratan masuk. Selain itu, dikarenakan masih kuatnya minat politik untuk “nasionalisme ekonomi dan sumber daya”, kuatnya peran dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perekonomian dan birokrasi yang berat serta proses pengambilan keputusan guna memperoleh persetujuan, dan proses birokrasi yang panjang yang sering kali menghambat masuknya sebagian investor.

Gambar 11. Peringkat Indikator EoDB Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber: World Bank Group

Kesimpulan

- Secara gabungan, nilai PMDN dan PMA mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir yaitu dari Rp601,66 triliun di tahun 2016 menjadi Rp831,27 triliun.
- Secara keseluruhan, pada tahun 2020, tenaga kerja yang terserap baik melalui PMDN maupun PMA yaitu sebanyak 1.156.361 jiwa.
- Selama tahun 2016 hingga 2020, sektor primer merupakan sektor dengan realisasi investasi terendah jika dibandingkan dengan sektor sekunder dan tersier. Kondisi tersebut terjadi baik pada sisi PMDN maupun PMA.
- Jika dilihat berdasarkan sektornya, pada tahun 2019-2020, 5 sektor penyumbang PMDN terbesar berasal dari sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi; konstruksi; listrik, gas dan air; tanaman pangan, perkebunan dan peternakan; dan industri makanan. Sementara kontribusi PMA terbesar sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2020, berasal dari sektor listrik, gas dan air; perumahan, kawasan industri dan perkantoran; transportasi, gudang dan telekomunikasi; industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; serta pertambangan.
- Jika dilihat berdasarkan lokasinya, proporsi investasi PMDN pada *top 5* lokasi penyumbang PMDN, masih lebih besar dari pada total investasi PMDN daerah lainnya (29 provinsi lainnya). Dari sisi PMA, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten selalu menjadi penyumbang PMA terbesar dalam 5 tahun terakhir. Pada gabungan PMDN dan PMA, tren lokasi dengan investasi terbesar selama tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa daerah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten selalu masuk dalam lokasi investasi terbesar.
- Negara asal PMA terbesar didominasi oleh negara di kawasan Asia yaitu Singapura, Jepang, R.R. Tiongkok dan Hongkong. Selain negara-negara di Asia, Belanda merupakan negara di luar Asia yang juga menjadi investor terbesar yaitu pada tahun 2016 dan 2019.
- Saat ini peringkat kemudahan berusaha Indonesia (*ranking 73*) masih di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan Vietnam. Jika dibandingkan dengan BRICS *country*, *ranking* EoDB Indonesia masih di bawah Rusia, India dan China.
- Terdapat beberapa indikator EoDB yang perlu mendapatkan perhatian dan dorongan khusus, yaitu untuk indikator yang peringkatnya masih di atas 100 di tahun 2020 yaitu indikator *starting a business, enforcing contract, trading across border, dealing with construction permit, dan registering property*.
- OECD dalam *Investment Policy Reviews: Indonesia 2020* menyebutkan bahwa investor asing ragu berurusan dengan bisnis Indonesia yang rumit, setidaknya karena masih adanya hambatan PMA dan persyaratan masuk. Selain itu, dikarenakan masih kuatnya minat politik untuk “nasionalisme ekonomi dan sumber daya”, kuatnya peran dari BUMN dalam perekonomian dan birokrasi yang berat serta proses pengambilan keputusan guna memperoleh persetujuan, dan proses birokrasi yang panjang yang sering kali menghambat masuknya sebagian investor.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. Data Produk Domestik Bruto.

Kementerian Investasi/BKPM. Data Realisasi Investasi di Indonesia Berdasarkan Sektor, Lokasi dan Negara Asal. Bersumber dari <https://nswi.bkpm.go.id/>

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). *Investment Policy Reviews: Indonesia 2020*. Bersumber dari https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/kajian-kebijakan-investasi-oecd-indonesia-2020_4f7e8fad-id#page5

World Bank Group. *Doing Business* 2016-2020. Bersumber dari <https://www.doingbusiness.org/en/reports/>



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635

[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

 [puskajianggaran](https://www.instagram.com/puskajianggaran)

EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id